
PRANATAMANGSA DALAM BAYANG-BAYANG KEBIJAKAN PERTANIAN ORDE BARU DI BANTUL, 1970–1990

Rizki Dian Saputra

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Email: rizki.dian.saputra@ugm.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas posisi pranatamangsa dalam praktik pertanian petani di Kabupaten Bantul pada masa Orde Baru. Pranatamangsa dipahami sebagai sistem penanggalan matahari agraris yang disusun melalui observasi peredaran matahari, perubahan musim, dan gejala ekologis. Sejak awal 1970-an, kebijakan pertanian Orde Baru melalui program Revolusi Hijau mendorong penyeragaman pola tanam, penggunaan input kimia, dan pengendalian produksi oleh negara. Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana pranatamangsa dipertahankan, beradaptasi, dan berfungsi dalam konteks kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan arsip statistik, literatur sezaman, dan wawancara lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pranatamangsa tetap digunakan, meskipun fungsinya lebih terbatas sebagai pengetahuan situasional.

Kata Kunci: Pranatamangsa; Bantul; Orde Baru; kebijakan pertanian; Revolusi Hijau

PRANATAMANGSA IN THE SHADOW OF NEW ORDER AGRICULTURAL POLICIES IN BANTUL, 1970–1990

Abstract

This article examines the role of pranatamangsa in the agricultural practices of farmers in Bantul Regency during the New Order period. Pranatamangsa is understood as a solar-based agrarian calendar system developed through observations of the sun's movement, seasonal changes, and ecological phenomena. Since the early 1970s, New Order agricultural policies, through the Green Revolution program, promoted standardized cropping patterns, the use of chemical inputs, and state control over production. This article aims to analyze how pranatamangsa was maintained, adapted, and functioned within the context of these policies. The study employs a historical method, utilizing statistical archives, contemporary literature, and oral interviews. The results indicate that pranatamangsa continued to be used, although its function became more limited as situational knowledge.

Keywords: Pranatamangsa; Bantul; New Order; Agricultural Policy; Green Revolution

I. PENDAHULUAN

“Penerapan teknologi pertanian baru dalam rangka intensifikasi, menghadapi dua masalah. Pertama, petani tersebar hampir di setiap pulau dan mempunyai berbagai tingkat pengetahuan. Kedua, menyediakan teknologi tersebut pada lokasi-lokasi yang mudah dijangkau petani. Demikian, Dirjen Pertanian Tanaman Pangan Ir. Wardoyo, ketika membuka ‘Rapat Kerja Nasional Tanaman Pangan dan Satuan Pengendali Bimas’ di Jakarta Kamis pagi” (*KOMPAS*, 12 November 1982).

Kutipan dari surat kabar *KOMPAS* tersebut menunjukkan tantangan pemerintah Indonesia periode Presiden Soeharto dalam melaksanakan program intensifikasi pertanian. Petani tersebar hampir di seluruh pulau sehingga menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan infrastruktur

Naskah masuk: 09-02-2026; Revisi akhir: 15-06-2026; Disetujui terbit: 17-06-2026

yang menyulitkan distribusi teknologi. Selain itu, petani memiliki tingkat pengetahuan berbeda yang bersumber dari sejarah panjang praktik agraris lokal. Berbagai pengetahuan agraris ini diwariskan turun-temurun dan mencakup dimensi teknis, ekologis, dan kultural yang berbeda pada setiap wilayah di Indonesia.

Salah satu bentuk sistem pengetahuan lokal mengenai pertanian tersebut adalah pranatamangsa. Menurut N. Daldjoeni (1983), “pranatamangsa merupakan sistem penanggalan agrarian berbasis peredaran matahari yang disusun berdasarkan observasi jangka panjang terhadap indikator-indikator ekologis seperti pola angin, curah hujan, perilaku hewan, serta siklus astronomis”. Bagi kalangan petani Jawa, pranatamangsa merupakan bagian integral dari sistem kepercayaan, struktur sosial, dan budaya agraris (Gustaman, 2020). Pengetahuan pranatamangsa terbentuk secara historis dan adaptif sehingga memungkinkan petani mengelola produksi pertanian dengan mempertimbangkan variabilitas ekologis di setiap wilayah (Sobirin & Supardiyono, 2018). Ketika negara memperkenalkan program intensifikasi pertanian dalam kerangka Revolusi Hijau yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan peningkatan produktivitas pranatamangsa mulai terpinggirkan (Gumelar & Ardi, 2024).

Pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia dimulai sekitar tahun 1967, bertepatan dengan awal pemerintahan Presiden Soeharto (Pontius, 1995). Dalam konteks Indonesia, Revolusi Hijau dipahami sebagai proyek pembangunan pertanian yang bertujuan meningkatkan produksi pangan sekaligus mengintegrasikan sektor pertanian ke dalam strategi industrialisasi nasional (Tjondronegoro, 1990). Melalui program-program seperti Bimbingan Massal (BIMAS), Intensifikasi Massal (INMAS), dan Intensifikasi Khusus (INSUS), pemerintah memperkenalkan input pertanian modern berupa varietas unggul padi (*HYVs*), pupuk kimia, serta sistem irigasi teknis (Asnawi, 1988).

Pelaksanaan intensifikasi pertanian dalam kerangka Revolusi Hijau juga tidak terlepas dari konteks ekonomi global pada dekade 1970-an, terutama fenomena *Oil Boom* atau lonjakan harga minyak dunia (Hill, 1992). Peningkatan pendapatan negara dari ekspor minyak memberikan ruang fiskal yang luas bagi pemerintahan Presiden Soeharto untuk membiayai program-program intensifikasi pertanian secara massif (Lindblad, 1998). Dukungan dana dari *Oil Boom* ini memungkinkan pembangunan infrastruktur irigasi, subsidi pupuk, dan pembiayaan program intensifikasi pertanian dijalankan dengan terpusat dan berkesinambungan. Kebijakan ini berhasil mendorong peningkatan signifikan dalam produksi beras nasional dan pada tahun 1984, Indonesia dinyatakan swasembada beras dan menerima penghargaan dari *Food and Agriculture Organization (FAO)* (*Berita Yudha*, 22 Juli 1986).

Namun, di balik capaian tersebut muncul konsekuensi struktural terhadap pranatamangsa sebagai sistem pengetahuan agraris lokal. Penekanan kebijakan pertanian Orde Baru pada penyeragaman pola tanam dan kalender produksi nasional secara bertahap menggeser sistem

pengelolaan waktu tanam yang berakar pada pengalaman ekologis setempat (Gumelar & Ardi, 2024). Situasi ini memunculkan persoalan mengenai relasi antara kebijakan pertanian negara dan keberlanjutan pranatamangsa dalam praktik pertanian petani. Penelitian ini difokuskan di Kabupaten Bantul, sebuah wilayah agraris di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi arena penting perjumpaan antara kebijakan pertanian terpusat dan pengetahuan agraris lokal.

Kajian mengenai pranatamangsa telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan penekanan yang beragam. N. Daldjoeni menempatkan pranatamangsa sebagai sistem penanggalan agraris dengan peranan bioklimatologis dan fungsi sosiokultural dalam kehidupan petani Jawa (Daldjoeni, 1983). F. van den Bosch menelusuri sejarah pranatamangsa sebagai sistem kalender pertanian yang tersusun berdasarkan peredaran matahari dan pengamatan astronomis (Bosch, 1980). Sementara itu, Ali Badrudin melalui kajian etnolinguistik menunjukkan pranatamangsa sebagai sistem pengetahuan yang hidup dalam praktik bahasa, simbol, dan budaya agraris masyarakat Jawa (Badrudin, 2018). Meskipun kajian-kajian tersebut juga membahas pranatamangsa, pembahasan mengenai posisinya dalam praktik pertanian di bawah kebijakan pertanian Orde Baru pada tingkat lokal masih terbatas.

Secara konseptual, penelitian ini memandang pembangunan pertanian sebagai ruang perjumpaan antara kebijakan negara dan sistem pengetahuan lokal dalam konteks historis dan ekologis (Dewalt, 1994). Pada masa Orde Baru, kebijakan pertanian yang terpusat mendorong penyeragaman kalender tanam, komoditas, dan praktik produksi, sementara pranatamangsa berakar pada pengalaman agraris jangka panjang petani Jawa (Sindhunata, 2008). Dalam kerangka ini, pranatamangsa dapat dipahami sebagai sistem pengetahuan yang bernegosiasi dengan kebijakan negara dan membentuk praktik pertanian petani Bantul.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan memanfaatkan arsip statistik, surat kabar, dan literatur sezaman (Kuntowijoyo, 2018). Sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan petani di beberapa kapanewon di Kabupaten Bantul yang mengalami langsung penerapan kebijakan pertanian Orde Baru. Keterbatasan jumlah informan tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik, melainkan untuk menangkap variasi pengalaman dan praktik pertanian petani dalam konteks kebijakan pertanian Orde Baru di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana kebijakan pertanian masa Orde Baru membentuk posisi pranatamangsa dalam praktik pertanian petani di Kabupaten Bantul? Selain itu, penelitian ini menelaah sejauh mana pranatamangsa mampu bertahan sebagai sistem pengetahuan agraris di tengah tekanan penyeragaman dan efisiensi produksi pertanian atau justru mengalami pembatasan fungsi hingga berperan sebagai pengetahuan situasional dalam kehidupan agraris petani?

II. PEMBAHASAN

A. Konteks Historis Pranatamangsa sebagai Sistem Penanggalan Agraris di Jawa

Secara etimologis, istilah pranatamangsa berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu *pranata* dan *mangsa*. Kata *pranata* merujuk pada aturan atau tatanan, sementara *mangsa* berarti waktu, musim, atau pembagian periodik yang berkaitan dengan perubahan iklim tahunan (Badrudin, 2018). Pranatamangsa dapat dipahami sebagai suatu sistem pengaturan waktu agraris berdasarkan pengamatan berkelanjutan terhadap peredaran matahari, pergantian musim, serta gejala-gejala ekologis (Daldjoeni, 1983). Sebagai pengetahuan agraris, pranatamangsa telah berkembang jauh sebelum intervensi negara modern dan menjadi bagian integral dari kehidupan pertanian masyarakat Jawa.

Keberadaan sistem pengetahuan musim ini telah menarik perhatian pengamat Eropa sejak awal abad ke-19. Ketika pemerintahan Jawa berada di bawah kekuasaan Inggris, Thomas Stamford Raffles mencatat bahwa masyarakat Jawa memiliki pemahaman yang rinci mengenai variasi musim dan keterkaitannya dengan kegiatan pertanian (Raffles, 2008). Dalam *The History of Java*, Raffles menulis:

“...Variasi musim ini bisa dihitung berdasarkan tanda-tanda alam atau perhitungan waktu, yang akan diterangkan di bagian lain. Untuk menjaga keselamatan desa dan memberi tahu petani mengenai waktu-waktu yang tepat untuk bercocok tanam merupakan tugas pemuka agama desa. Beberapa musim kecil ini, yang pertama terjadi setelah musim panen berakhir di bulan Agustus atau September selama 41 hari. Selama musim ini, daun-daun rontok dari pohonnya, tanaman banyak yang terganggu, dan para petani biasanya membakar rumput serta semak liar untuk mempersiapkan tegal atau gagas. Di musim kedua yang berlangsung selama 25 hari, tumbuh-tumbuhan mulai bersemi lagi. Musim ketiga yang berlangsung selama 24 hari, merupakan masa paling tepat untuk menanam ubi jalar, ubi dan tanaman lain sebagai tanaman pengganti. Bunga-bunga liar di hutan mulai bersemi, dan pada saat itu mulailah periode musim kering. Musim keempat juga berlangsung selama 24 hari. Pada musim ini banyak hewan liar melakukan perkawinan, kemudian angin kencang mulai sering terjadi, hujan mulai turun, dan permukaan sungai meluap. Musim kelima berlangsung selama 26 hari, bibit padi mulai dipersiapkan dan saluran irigasi mulai diperbaiki untuk digunakan pada masa bercocok tanam dimana memerlukan pengairan. Pada musim keenam yang berlangsung selama 41 hari, lahan mulai dibajak dan bibit padi mulai disebarkan di sawah. Musim ketujuh berlangsung selama 41 hari, selama musim ini pari mulai dipindahkan ke sawah dan kembali diairi. Pada musim kedelapan yang terjadi selama 26 hari, tanaman mulai tumbuh tinggi melebihi air dan mulai berkembang. Musim kesembilan berlangsung selama 25 hari, dan selama musim ini batang-batang padi mulai tumbuh. Musim kesepuluh juga berlangsung selama 25 hari, dimana padi mulai masak dan menguning. Di musim kesebelas, musim panen tiba selama 26 hari, dan di musim kedua belas yang berlangsung selama 41 hari, musim panen selesai, padi telah disimpan, dan musim kering pun dimulai, dimana siang hari sangat panas dan malam harinya paling dingin di tahun itu...” (Raffles, 2008).

Uraian Raffles tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Jawa telah lama memiliki kemampuan untuk membedakan fase-fase iklim secara rinci dengan merujuk pada tanda-tanda alam, seperti perubahan vegetasi, perilaku hewan, kondisi cuaca, dan siklus hidrologi. Setiap periode musim memiliki durasi tertentu dan berkaitan langsung dengan tahapan kegiatan pertanian, mulai dari persiapan lahan, penanaman, hingga panen. Meskipun istilah pranatamangsa tidak disebutkan secara eksplisit, penjelasan Raffles menunjukkan keberadaan suatu sistem penanggalan

agraris yang secara struktural sangat dekat dengan pranatamangsa sebagaimana dikenal kemudian.

Pengamatan serupa juga disampaikan oleh John Crawford yang menggambarkan pembagian musim pertanian masyarakat Jawa sebagai berikut:

“Musim pertama ditandai dengan jatuhnya dedaunan. Petani membakar rumput kering, dan memotong pepohonan, guna penanaman padi gunung, (Humah). Musim kedua ditandai dengan dimulainya tumbuhnya tanaman. Pada musim ketiga, tumbuh-tumbuhan liar mulai mekar. Petani akan sibuk menanam ubi rambat, kacang-kacangan, dan tanaman sekunder lainnya. Musim keempat adalah musim cinta, atau perkawinan diantara hewan-hewan liar. Di musim ini angin bertiup kencang, dan sungai-sungai mulai bertambah besar. Pada musim kelima, petani menyiapkan berbagai perkakas pertanian guna pemeliharaan padi, dan ia pun mengatur jalannya saluran air, dan memperbaiki tanggul-tanggul. Pada musim keenam, petani bekerja untuk membajak, dan menaburkan benih padi. Pada musim ketujuh, sang petani memindahkan padi, dan mengatur jalannya saluran air. Pada musim kedelapan, tanaman padi mulai mekar, dan tumbuh setinggi tanggul irigasi. Pada musim kesembilan, benih membentuk padi. Musim kesepuluh ditandai dengan berubahnya padi menjadi kuning, dan padi mulai matang. Pada musim kesebelas, padi masak, dan panen pun dimulai. Pada musim kedua belas, cuaca yang dingin atau musim dingin dimulai, dan panen padi berakhir dan ditaruh di dalam pondok.” (Crawford, 2017).

Kutipan Crawford tersebut menegaskan bahwa pembagian musim dalam masyarakat Jawa tidak hanya berkaitan dengan perubahan cuaca, tetapi juga terhubung erat dengan siklus biologis tanaman, perilaku fauna, serta tahapan kerja pertanian. Setiap musim tidak didefinisikan secara abstrak, melainkan dikaitkan langsung dengan tahapan kerja pertanian, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Penjelasan Crawford tersebut merepresentasikan pranatamangsa sebagai hasil akumulasi pengalaman agraris jangka panjang yang dibentuk melalui observasi terhadap siklus alam.

Pemahaman agraris yang berlandaskan pembacaan ritme alam tersebut tidak berhenti pada tingkat praktik lokal, tetapi kemudian mengalami proses penataan dalam konteks kekuasaan kraton. Pada pertengahan abad ke-19, Kasunanan Surakarta memberikan perhatian khusus terhadap penertiban sistem waktu agraris. Pembakuan pranatamangsa dilakukan oleh Susuhunan Pakubuwono VII pada tanggal 22 Juni 1855 sebagai upaya untuk menyusun dan menstabilkan pengetahuan musim yang telah lama hidup dalam praktik pertanian masyarakat Jawa (Ricklefs, 1978). Proses pembakuan pranatamangsa tersebut dilakukan bersama A. B. Cohen Stuart, seorang filolog yang meneliti naskah-naskah Jawa.¹



Gambar 1. Susuhunan Pakubuwono VII
Sumber: Leiden University Libraries Digital Collections, 1854.

Proses pembakuan pranatamangsa pada pertengahan abad ke-19 menghasilkan susunan sistematis yang memungkinkan sistem pengetahuan musim tersebut dituangkan dalam bentuk yang lebih teratur dan dapat dirujuk secara tertulis (Bosch, 1980). Penataan ini tidak hanya penting bagi kepentingan administrasi waktu agraris di lingkungan wilayah kraton, tetapi juga berfungsi sebagai upaya standardisasi pengetahuan musim yang sebelumnya hidup dalam variasi praktik lokal (Ricklefs, 1978). Melalui kodifikasi tersebut, pranatamangsa disajikan sebagai kalender agraris yang terdiri atas 12 mangsa dengan urutan, penamaan, dan durasi hari yang ditetapkan secara pasti. Susunan pranatamangsa yang telah terkodifikasi kemudian menjadi acuan utama dalam memahami struktur waktu pertanian Jawa sebagaimana dikenal hingga awal abad ke-20.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Hari dalam Sistem Mangsa menurut Raffles, John Crawford, dan Pranatamangsa Terkodifikasi oleh Susuhunan Pakubuwono VII

Mangsa (Musim)	Raffles (Jumlah Hari)	Crawford (Jumlah Hari)	Pranatamangsa Susuhunan Pakubuwono VII	
			Periode (Kalender Masehi)	Jumlah Hari
Kasa	41	41	22 Juni – 1 Agustus	41
Karo	25+	23	2 Agustus-24 Agustus	23
Katiga	24	24	25 Agustus-17 September	24
Kapat	24-	24-	18 September-12 Oktober	25
Kalima	26	26	13 Oktober-8 November	27
Kanem	41	41	9 November-21 Desember	43
Kapitu	41	41	22 Desember-2 Februari	43
Kawolu	26	26	3 Februari-28/29 Februari	26/27
Kasanga	25	25	1 Maret-25 Maret	25
Kasadasa	25+	25+	26 Maret-18 April	24
Destha	26+	23	19 April-11 Mei	23
Sadha	41	41	12 Mei – 21 Juni	41
Total (Hari)	365	360	365/366	

Sumber; Raffles, 2008; Crawford, 2017; Van Hien, H.A, 1897; Almanak Déwi Sri 1971, dan Wawancara dengan Penghageng Tepas Widya Budoyo Kraton Ngayogyakarta K.R.T Rintoisworo, 2025.

Perbandingan antara sistem mangsa yang dicatat oleh Raffles, Crawford, dan pranatamangsa yang telah terkodifikasi menunjukkan adanya variasi jumlah hari pada beberapa mangsa. Perbedaan jumlah hari pada beberapa mangsa sebelum kodifikasi karena penentuan durasi mangsa didasarkan pada kemunculan rasi bintang, bukan pada peredaran tahunan matahari (Bosch, 1980). Dalam pranatamangsa yang telah terkodifikasi satu tahun masehi dibagi ke dalam 12 mangsa yang disusun berdasarkan peredaran tahunan matahari. Penentuan awal mangsa dilakukan melalui pengamatan bayangan matahari, baik dengan tubuh manusia maupun tongkat tegak yang memungkinkan identifikasi lintasan tahunan matahari secara konsisten (Ammarell,1988).

Kodifikasi pranatamangsa tidak sekadar menyusun ulang pembagian mangsa, tetapi juga menyesuaikannya dengan peredaran tahunan matahari sehingga membentuk sistem penanggalan yang lebih konsisten. Melalui proses kodifikasi atau pembakuan, pranatamangsa memperoleh susunan yang relatif stabil sehingga dapat digunakan secara lebih luas dalam pengaturan waktu agraris. Dengan demikian, pranatamangsa sebagai pengetahuan agraris mengalami proses institusionalisasi sebelum masuknya intervensi kebijakan pertanian modern pada abad ke-20.

B. Masuknya Kebijakan Pertanian Orde Baru di Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul memiliki tradisi pertanian yang kuat dengan orientasi ekonomi rumah tangga dan komunitas yang bertumpu pada hasil-hasil sawah (Harnoko, 2015). Catatan kolonial akhir abad ke-19 menunjukkan bahwa Bantul dikenal sebagai kawasan pertanian produktif, sebagaimana dicatat oleh Rosemeier, Asisten Residen Yogyakarta, yang menilai pendapatan hasil panen di wilayah tersebut relatif tinggi pada masanya (Suhartono, 1995). Laporan pada tahun 1936 menginformasikan bahwa Bantul mengalami masa panen padi yang sangat baik dan ketersediaan beras mencukupi di hampir seluruh desa (*De Locomotief*, 22 Maret 1936). Informasi-informasi ini menegaskan bahwa jauh sebelum program intensifikasi diterapkan, Bantul telah memiliki kapasitas pertanian yang mapan.

Secara geografis, Kabupaten Bantul memiliki karakter ekologi yang mendukung aktivitas pertanian. Aliran sungai besar seperti Progo, Opak, dan Oyo yang melintasi wilayah ini menyediakan pasokan air untuk mendukung aktivitas pertanian (Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Bantul, 1984). Struktur mata pencaharian masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantul pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an memperlihatkan dominasi sektor pertanian (Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Bantul, 1980). Tercatat terdapat 8.607 petani penggarap yang mengusahakan tanah orang lain dengan luas garapan kurang dari seperempat hektar, menempatkan wilayah Bantul sebagai salah satu kantong buruh tani terbesar di DIY (*Berita Nasional*, 16 Januari 1981).

Masuknya kebijakan modernisasi pertanian ke Kabupaten Bantul dimulai sejak awal 1970-an seiring peluncuran program intensifikasi secara nasional (*Arsip BPAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1761*, 1971). Pemerintah melalui Dinas Pertanian memperkenalkan program BIMAS, INMAS, dan INSUS yang mewajibkan penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan benih unggul sebagai standar keberhasilan panen (*Arsip BPAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1788*, 1980). Dalam praktik di lapangan, penyuluh pertanian di Bantul memperkenalkan kebijakan tersebut dengan istilah “RABI GABAH” (Rabuk, Bibit, Garapan Air, dan Hasil) yang melekat dalam memori kolektif petani.

Pada pertengahan dekade 1970-an, pelaksanaan intensifikasi pertanian di Kabupaten Bantul ditandai oleh penetapan target produksi secara terpusat melalui pengukuran areal tanam dan pembagian wilayah kerja administratif. Pada Musim Tanam 1974–1975, pemerintah menetapkan sasaran BIMAS padi seluas 19.000 hektar yang terdiri atas 16.000 hektar BIMAS baru dan 3.000

hektar INMAS baru (*Kedaulatan Rakyat*, 10 Oktober 1974). Target tersebut dilaksanakan melalui pembagian ke dalam 13 unit kecamatan sebagai satuan operasional di tingkat lokal.

Tabel 2. Alokasi Areal Intensifikasi Bimas dan Inmas Padi di Kabupaten Bantul Menurut Unit Kecamatan, Musim Tanam 1974–1975

No.	Kecamatan	BIMAS Baru (ha)	INMAS Baru (ha)
1.	Sedayu	970	215
2.	Kasih	750	150
3.	Sewon	750	170
4.	Piyungan	-	2.050
5.	Gondowulung	1.495	165
6.	Jetis	1.350	150
7.	Bantul	1.365	210
8.	Bambanglipuro	960	350
9.	Sanden	1.350	390
10.	Kretek	1.380	240
11.	Pundong	1.475	220
12.	Imogiri	850	205
13.	Dlingo	255	120

Sumber: Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, 10 Oktober 1974.

Selain pengaturan areal tanam, pelaksanaan intensifikasi pertanian di Kabupaten Bantul juga ditopang oleh pengendalian sarana produksi dan teknik budidaya secara ketat. Untuk mendukung areal seluas 19.000 hektar, pemerintah merencanakan penyediaan pupuk dalam jumlah besar, yakni 5.157.500 kg urea dan 1.598.750 kg TSP (*Kedaulatan Rakyat*, 10 Oktober 1974). Kebijakan intensifikasi pertanian ini tidak hanya mengubah sarana produksi, tetapi juga mengatur ulang jenis varietas padi dan struktur waktu tanam petani. Sebelum Revolusi Hijau, petani di Kabupaten Bantul menanam padi lokal seperti Segreng Handayani, Sembada Merah, dan Sembada Hitam yang memiliki siklus panjang dan bergantung pada musim hujan (*Suara Karya*, 1 Oktober 1980). Penanaman dilakukan pada Oktober hingga November setelah hujan pertama dan hanya satu kali dalam setahun (*Suara Karya*, 1 Oktober 1980).

Seiring dengan modernisasi pertanian, pemerintah mendistribusikan varietas unggul seperti IR-32 yang setara dengan PB-34 dengan umur panen sekitar 140 hari serta IR-36 yang sebanding dengan IR-30 dengan umur lebih pendek sekitar 105 hingga 110 hari (*Arsip BPAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1833*, 1976). Penggunaan varietas ini diikuti dengan penerapan teknik budidaya yang lebih ketat seperti penanaman satu bibit per rumpun (*eenling*) dan pencabutan varietas simpang untuk menjaga keseragaman tanaman. Melalui sistem irigasi teknis, petani didorong untuk menanam dua hingga tiga kali dalam setahun, yakni Musim Tanam I pada Oktober hingga Januari sebagai periode panen utama, Musim Tanam II pada Februari hingga Mei

sebagai masa peralihan, serta Musim Tanam III pada Juni hingga September yang hanya dapat dilakukan di lahan dengan dukungan irigasi memadai (*Arsip BPAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1833*, 1976).

Dalam praktiknya, penerapan pola tanam dan penggunaan varietas unggul tersebut tidak sepenuhnya bersifat sukarela. Meskipun tidak ada sanksi formal bagi petani yang tidak mengikuti program intensifikasi, tetapi tekanan muncul melalui pembatasan akses terhadap sarana produksi (*Berita Yudha*, 16 Juli 1984). Berdasarkan memori kolektif petani, mereka yang tidak mengikuti anjuran pemerintah seringkali tidak memperoleh pupuk bersubsidi, pestisida, dan kredit pertanian melalui Koperasi Unit Desa (KUD) (Jumadil, wawancara pribadi, 28 Oktober 2025).

Rangkaian hasil kebijakan intensifikasi tersebut tercermin dalam perkembangan statistik produksi padi di Kabupaten Bantul pada dekade-dekade berikutnya. Data luas panen, produktivitas, dan total produksi padi sawah menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada masa awal penerapan program intensifikasi, meskipun tidak selalu berlangsung stabil dalam jangka panjang. Perubahan-perubahan ini memberikan gambaran mengenai capaian teknis intensifikasi sekaligus dinamika struktural yang menyertainya.

Tabel 3. Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Tanaman Bahan Pangan (Padi Sawah) di Kabupaten Bantul Tahun 1969-1991

No.	Tahun	Luas Panen (Hektar)	Rata-Rata Produksi (Kuintal/Hektar)	Produksi (ton)
1.	1969	24.317	41,71	101,431
2.	1972	25.017	42,88	107.274
3.	1975	26.939	47.39	127.669
4.	1978	30.342	56.93	172.733
5.	1980	29.320	58.93	173.249
6.	1984	28.417	54,69	155.425
7.	1988	25.106	56.58	142.052

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Bantul, Bantul dalam Angka Tahun 1970, Bantul dalam Angka Tahun 1972, Bantul dalam Angka Tahun 1975, Bantul dalam Angka Tahun 1978, Bantul dalam Angka Tahun 1980, Bantul dalam Angka Tahun 1984; dan Kantor Statistik D.I. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka Tahun 1988,

Berdasarkan tabel tersebut, program intensifikasi pertanian di Kabupaten Bantul menunjukkan peningkatan produksi pada dekade awal penerapannya. Pada tahun 1969, luas panen mencapai 24.317 hektar dengan produktivitas 41,71 kuintal per hektar dan produksi 101.431 ton. Angka ini meningkat hingga puncaknya pada tahun 1978 dengan luas panen 30.342 hektar, produktivitas 56,93 kuintal per hektar, dan produksi 172.733 ton. Setelah itu, luas panen menurun meskipun produktivitas tetap lebih tinggi dibandingkan akhir 1960-an. Pada tahun 1988, luas panen tercatat 25.106 hektar dengan produktivitas 56,58 kuintal per hektar dan produksi 142.052 ton. Data-data ini menunjukkan bahwa program intensifikasi berhasil meningkatkan produksi pada tahap

awal, tetapi tidak sepenuhnya berkelanjutan karena fluktuasi hasil panen mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara capaian teknis dan kondisi struktural di lapangan.

C. Pranatamangsa dalam Praktik Pertanian Petani Bantul pada Masa Revolusi Hijau

Berdasarkan memori kolektif petani di Kabupaten Bantul, pranatamangsa tidak hanya berfungsi sebagai penanda musim, tetapi juga mengatur tahapan kerja pertanian secara rinci sepanjang tahun. Setiap mangsa berkaitan langsung dengan aktivitas agraris tertentu (*Almanak Dewi Sri*, 1971). Gambaran mengenai ritme kerja petani berdasarkan pranatamangsa dapat ditemukan dalam laporan surat kabar *BERNAS* yang merekam praktik pertanian di tingkat lokal sebagai berikut:

“...Mangsa *Kasa* berlangsung antara Juni hingga awal Agustus, petani membakar sisa jerami di sawah sebagai persiapan lahan. Pada mangsa *Karo* masih di bulan Agustus, tanaman palawija mulai tumbuh. Pada mangsa *Katiga* antara Agustus akhir hingga September, berlangsung musim kemarau sekaligus masa panen palawija. Pada mangsa *Kapat* antara September hingga Oktober, petani mulai mengolah tanah untuk persiapan tanam padi. Pada mangsa *Kalima* antara Oktober hingga November, petani mengatur pengairan dan membuat pematang. Tahapan berikutnya memperlihatkan proses produksi padi yang semakin intensif. Pada mangsa *Kanem* antara November hingga Desember, petani membajak sawah dan menyebar benih. Pada mangsa *Kapitu* antara Desember hingga Februari, bibit mulai ditanam dalam kondisi curah hujan tinggi. Pada mangsa *Kawolu*, masih di bulan Februari, tanaman padi mulai tumbuh dan menghijau. Pada mangsa *Kasanga* bulan Maret, padi memasuki fase berbunga. Pada mangsa *Kasepuluh* antara Maret hingga April, padi mulai menguning sebagai tanda mendekati panen. Pada mangsa *Dhesta* antara April hingga Mei, petani melakukan panen. Pada mangsa *Sadha* antara Mei hingga Juni, petani menjemur hasil panen dan memasuki masa jeda sebelum siklus berikutnya...” (*BERNAS*, 13 September 1992).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pranatamangsa berfungsi sebagai pedoman kerja agraris yang mengatur tahapan produksi berdasarkan siklus waktu dan kondisi alam. Masuknya kebijakan pertanian Orde Baru melalui program intensifikasi mengubah posisi tersebut dalam pengaturan waktu tanam. Negara memperkenalkan pola tanam dua kali padi per tahun sebagai ukuran keberhasilan produksi tanpa mempertimbangkan variasi musim dan kondisi ekologis setempat. Kalender tanam resmi yang disebarkan melalui penyuluh kemudian menjadi acuan utama dalam menentukan waktu tanam dan panen (Gumelar & Ardi, 2024). Dalam konteks ini, pranatamangsa tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi tidak lagi menjadi dasar utama pengambilan keputusan agraris petani. Wartini (72 tahun), seorang petani di Kapanewon Imogiri, menuturkan:

“Sebelum ada program pertanian dari Pak Harto, menanam (padi) itu melihat mangsa. Kalau sudah masuk mangsa *kapitu* atau *kawolu*, baru berani menanam. Semua petani hafal karena ilmu perhitungannya sudah turun-temurun. Setelah ada program, ya harus mengikuti jadwal dari penyuluh. Saya ingat di Imogiri sini diberi tahu bahwa kalau ingin hasil panennya banyak harus mengikuti, menggunakan benih padi dan pupuk dari bantuan pemerintah.”²

Pernyataan tersebut memperlihatkan pergeseran otoritas pengetahuan agraris dari pranatamangsa menuju kalender tanam yang ditentukan negara, sehingga pengetahuan musim yang sebelumnya diwariskan secara turun-temurun mengalami pembatasan ruang operasional.

Keputusan bertani kemudian lebih ditentukan oleh kepatuhan terhadap jadwal tanam, penggunaan benih unggul, dan pemakaian pupuk bersubsidi. Dalam kondisi ini, pranatamangsa tidak sepenuhnya hilang, tetapi tetap hidup dalam ingatan dan pengalaman petani sebagai pengetahuan yang digunakan secara terbatas dan kontekstual. Dalam praktik sehari-hari pada masa Revolusi Hijau, pranatamangsa tidak lagi menjadi pedoman utama, melainkan dimanfaatkan secara selektif untuk membaca tanda-tanda alam seperti potensi serangan hama, waktu pengolahan lahan, dan perubahan cuaca. Jumadil (78 tahun), seorang petani di Kapanewon Pandak menjelaskan:

“Pada masa Pak Harto dulu, karena ada program BIMAS INMAS atau yang orang-orang sebut RABI GABAH, pranatamangsa jadi tidak dipakai sebagai patokan utama, tetapi masih dipakai untuk memperkirakan. Kalau mangsa *katelu* biasanya banyak wereng, jadi harus lebih berhati-hati misalnya. Saya sendiri masih menerapkan hitungan hafalan mangsa itu, Mas.”³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pranatamangsa tetap hadir dalam praktik bertani, meskipun perannya menyempit. Pranatamangsa masih berfungsi sebagai kerangka interpretatif untuk membaca dinamika alam, tetapi tidak lagi menentukan keputusan tanam secara formal. Keberadaannya kini menjadi rujukan pendukung yang melengkapi kalender tanam negara. Keberlanjutannya bergantung pada pengalaman petani dan konteks ekologis setempat. Dalam situasi ini, pranatamangsa berperan sebagai pengetahuan adaptif untuk menegosiasikan ketidakpastian alam di tengah penyeragaman praktik pertanian.

Selain dalam praktik pertanian, pranatamangsa tetap digunakan dalam dimensi kehidupan agraris yang lebih luas di Kabupaten Bantul. Sebagai sistem pengetahuan tentang pembagian waktu dan siklus alam, pranatamangsa juga diwujudkan dalam bentuk *petungan mangsa* yang dipakai untuk menentukan hari baik dalam peristiwa-peristiwa penting seperti pernikahan, pembangunan rumah, dan lainnya (Doyodipuro, 1995). Praktik tersebut bertahan meskipun kebijakan pertanian modern membatasi peran pranatamangsa dalam urusan tanam. Mulyono (73 tahun) petani di Kapanewon Sewon menjelaskan bahwa pranatamangsa tidak hanya digunakan untuk pertanian saja, tetapi juga mencari hari-hari baik.

“Pranatamangsa itu tidak hanya dipakai untuk urusan pertanian. Hitungannya bisa dipakai untuk mencari hari yang baik, misalnya untuk menikah atau membangun rumah, orang-orang masih melihat petungan. Itu sudah menjadi tradisi sejak dulu”⁴

Praktik penggunaan pranatamangsa dalam penentuan hari baik menegaskan posisinya sebagai bagian dari tata waktu sosial masyarakat Jawa. Sistem ini menghubungkan aktivitas agraris dengan siklus kehidupan manusia, dari kelahiran hingga pembangunan ruang hidup. Dalam konteks ini, pranatamangsa berfungsi sebagai penghubung antara kerja agraris dan tatanan sosial. Keberadaannya menunjukkan bahwa pengetahuan lokal tetap bertahan dalam dimensi simbolik dan kultural yang relatif tidak tersentuh oleh intervensi langsung kebijakan negara.



Gambar 2. Papan Petungan Pranatamangsa atau Kalamudheng
Sumber: Rizki Dian Saputra, 2025.

Gambar papan petungan ini memperlihatkan bagaimana pranatamangsa divisualisasikan dan digunakan secara praktis oleh masyarakat. Papan petungan memuat pembagian mangsa, hitungan hari, serta petunjuk simbolik yang memudahkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari (Tjakraningrat, 1990). Keberadaan papan petungan menunjukkan bahwa pranatamangsa tidak hanya hadir dalam bentuk teks atau hafalan, tetapi juga sebagai alat bantu visual.

Secara keseluruhan, praktik pranatamangsa pada masa Revolusi Hijau di Kabupaten Bantul menunjukkan relasi negosiasi antara kebijakan pertanian negara dan pengetahuan agraris lokal. Program intensifikasi melalui penyeragaman kalender tanam, penggunaan teknologi, dan penetapan target produksi membatasi peran pranatamangsa sebagai pedoman utama bercocok tanam. Namun, pranatamangsa tidak tersingkir dari praktik agraris petani. Pranatamangsa tetap dipertahankan sebagai pengetahuan situasional yang digunakan untuk membaca tanda-tanda alam, mengantisipasi gangguan ekologis, serta mengatur dimensi waktu sosial dalam kehidupan pedesaan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan pertanian pada masa Orde Baru membentuk ulang praktik pertanian petani di Kabupaten Bantul. Melalui mekanisme BIMAS, INMAS, dan INSUS, kalender tanam resmi ditempatkan sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan bercocok tanam sehingga menggeser pranatamangsa dari perannya sebagai sistem pengatur waktu agraris. Dalam konteks tersebut, pranatamangsa tidak lagi menentukan langsung proses produksi pertanian karena keputusan tanam semakin diarahkan oleh kebijakan negara

Pranatamangsa tidak sepenuhnya hilang dari praktik agraris petani Bantul. Sistem pengetahuan ini tetap dipertahankan dalam bentuk penggunaan yang terbatas dan selektif. Pranatamangsa dimanfaatkan untuk membaca tanda-tanda alam, memperkirakan gangguan hama dan cuaca,

serta mengatur waktu dalam kehidupan sosial pedesaan. Keberlangsungannya bergantung pada kemampuan petani menyesuaikan pengetahuan agraris lokal dengan kebijakan pertanian yang bersifat terpusat, sehingga pranatamangsa tetap hadir dalam praktik keseharian meskipun tidak lagi menjadi dasar utama pertanian.

B. Saran

Artikel ini dapat diposisikan sebagai upaya mendokumentasikan pranatamangsa sebagai pengetahuan agraris lokal yang tetap dijalankan secara terbatas dalam praktik pertanian petani Bantul pada masa Orde Baru. Penelitian lanjutan perlu memperluas wilayah kajian dan rentang waktu untuk membandingkan variasi keberlangsungan pranatamangsa di daerah dengan kondisi ekologis dan intensitas intervensi pertanian yang berbeda. Kajian berikutnya juga disarankan memperdalam penggunaan sumber lisan lintas generasi guna menelusuri perubahan fungsi pranatamangsa secara jangka panjang. Selain itu, pemanfaatan sumber visual dan artefaktual seperti papan petungan dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai objek analisis untuk memahami praktik pranatamangsa di luar konteks produksi pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

De Locomotief, 22 Maret 1936

Berita Nasional, 16 Januari 1981

Berita Yudha, 16 Juli 1984

Berita Yudha, 22 Juli 1986

Kedaulatan Rakyat, 10 Oktober 1974

Suara Karya, 1 Oktober 1980

KOMPAS, 12 November 1982

BERNAS, 13 September 1992

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (1971). *Pemberitahuan usaha-usaha pembangunan di bidang pertanian (Nomor Arsip 1761)*. Koleksi Arsip BPAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (1976). *Penanggulangan Hama Wereng pada Tanaman Padi di DIY*. (Nomor Arsip 1833). Koleksi Arsip BPAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (1980). *Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Program Rakyat Intensifikasi Pangan (Nomor Arsip 1788)*. Koleksi Arsip BPAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Kantor Statistik Kabupaten Bantul. (1970). *Bantul dalam angka 1970*. Kantor Statistik Kabupaten Bantul.
- Kantor Statistik Kabupaten Bantul. (1972). *Bantul dalam angka 1972*. Kantor Statistik Kabupaten Bantul.
- Kantor Statistik Kabupaten Bantul. (1975). *Bantul dalam angka 1975*. Kantor Statistik Kabupaten Bantul.
- Kantor Statistik Kabupaten Bantul. (1978). *Bantul dalam angka 1978*. Kantor Statistik Kabupaten Bantul.
- Kantor Statistik Kabupaten Bantul. (1980). *Bantul dalam angka 1980*. Kantor Statistik Kabupaten Bantul.
- Kantor Statistik Kabupaten Bantul. (1984). *Bantul dalam angka 1984*. Kantor Statistik Kabupaten Bantul.
- Kantor Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (1988). *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 1988*. Kantor Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ammarell, G. (1988). Sky calendars of the Indo-Malay Archipelago: Regional diversity and local knowledge. *Indonesia*, 45, 85–104. <https://doi.org/10.2307/3351177>.
- Asnawi, S. (1988). Peranan dan masalah irigasi dalam mencapai dan melestarikan swasembada beras. *Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial Prisma*, (2), 6.
- Badrudin, A. (2018). *Pranata mangsa Jawa: Sebuah kajian etnolinguistik* (Disertasi). Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Behrend, T. E. (1993). Manuscript production in nineteenth-century Java: Codicology and the writing of Javanese literary history. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 149(3), 407–437. <http://www.jstor.org/stable/27864482>.
- Bosch, F. van den. (1980). Der Javanische Mangsakalender. *Bijdragen tot de Taal-Land- en Volkenkunde*, 136(2/3), 248–282. <http://www.jstor.org/stable/27863307>.
- Crawfurd, J. (2017). *Sejarah kepulauan Nusantara: Kajian budaya, agama, politik, hukum, dan ekonomi (Vol. 1)*. Penerbit Ombak.
- Daldjoeni, N. (1983). *Penanggalan pertanian Jawa pranatamangsa: Peranan bioklimatologis dan fungsi sosiokulturalnya*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- DeWalt, B. R. (1994). Using indigenous knowledge to improve agriculture and natural resource management. *Human Organization*, 53(2), 123–131. <http://www.jstor.org/stable/44126875>.
- Doyodipuro, H. (1995). *Horoskop Jawa: Misteri pranata mangsa*. Dahara Prize.
- Gumelar, R., & Ardi, M. (2024). Senjakala pranata mangsa: Transformasi kognitif dan perubahan struktur sosial petani Jawa. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 1(3), 25–43.
- Gustaman, B. (2020). Kalender petani dan sumber pengetahuan tentang musim tanam. *Jurnal Metahumaniora*, 10(2), 161–171. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v10i2.28762>.

- Harnoko, D. (2015). *Pertanian dan irigasi di Bantul pada awal abad XX: Kajian sejarah sosial-ekonomi*. Lintang Pustaka Utama.
- Hill, H. (1992). Regional development in a boom and bust petroleum economy: Indonesia since 1970. *Economic Development and Cultural Change*, 40(2), 351–379. <http://www.jstor.org/stable/1154201>.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Leiden University Libraries Digital Collections, Susuhunan Pakubuwono VII, 1854, https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/Pakubuwono%20VII/collection%kitlv_photos diakses 5 Februari 2026,
- Lindblad, J. T. (1998). Indonesian economic development in a time of globalization. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 154(2), 193–217. <http://www.jstor.org/stable/27865427>.
- Pontius, J. (1995). Awal pengembangan Revolusi Hijau. *Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial Prisma*, (2).
- Raffles, T. S. (2008). *The history of Java*. Penerbit Narasi.
- Ricklefs, M. C. (1978). *Modern Javanese historical tradition: A study of an original Kartasura chronicle and related materials*. School of Oriental and African Studies, University of London.
- Sindhunata. (2008). Pranatamangsa: Sebuah budaya yang terancam punah. *Majalah Basis*, 57(9–10), 36–46.
- Sobirin, & Supardiyono. (2018). Pranata mangsa dan budaya kearifan lingkungan. *Jurnal Budaya Nusantara*, 2(1), 250–264.
- Suhartono. (1995). *Bandit-bandit pedesaan: Studi historis 1850–1942 di Jawa*. Aditya Media.
- Tjakraningrat, K. P. H. (1990). *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna (ed. cet. 1991)*. Soemodidjojo Mahadewa.
- Tjondronegoro, S. M. P. (1990). Revolusi Hijau dan perubahan sosial di pedesaan Jawa. *Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial Prisma*, (2).
- U.P. Indonesia (Ed.). (1970). *Almenak Dewi Sri 1971*. U.P. Indonesia.
- Van Hien, H. A. (1906). *De Javaansche geestenwereld en de betrekking die tusschen de geesten en de zinnelijke wereld bestaat*. A. C. Nix & Co.

DAFTAR NARASUMBER

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	K.R.T Rintoisworo	82 Tahun	Abdi Dalem	Imogiri
2.	Wartini	72 Tahun	Petani	Imogiri
3.	Jumadil	78 Tahun	Petani	Pandak
4.	Mulyono	73 Tahun	Tetua Adat	Sewon

1 A.B. Cohen Stuart adalah filolog Belanda yang berperan dalam studi bahasa dan kesusastraan Jawa pada pertengahan abad ke-19. Ia lulus dari Akademi Delft pada tahun 1846. Sejak awal 1850-an, bersama Ranggawarsita melakukan kajian naskah Jawa di lingkup Kraton Surakarta. Pada periode 1862–1871, Cohen Stuart menjabat sebagai konservator manuskrip pertama di Bataviaasch Genootschap (Behrend, 1993).

2 Kutipan wawancara asli “Sakdurunge ana program pertanian seko Pak Harto nandur iku ndelok mangsa. Yen wis mlebu mangsa kapitu utawa kawolu, lagi wani nandur. Kabeh petani apal amarga ilmu itungane uwis turun-temurun. Sawise ana program, ya kudu manut jadwal saka penyuluh. Aku kelingan neng Imogiri kene dikandani nek pengen hasile panen akeh kudu manut nganggo bibit pari, pupuk seko bantuan pemerintah.” Wawancara dengan Wartini di Kapanewon Imogiri, 27 September 2025, Pukul 10.30 WIB.

3 Kutipan wawancara asli, “Pas jaman e Pak Harto biyen amarga ono program BIMAS INMAS utawa wong-wong nyebute Rabi Gabah, pranatamangsa dadi ora kanggo patokan utama, nanging isih kanggo ngira-ngira. Yen mangsa katelu biasane akeh wereng, dadi kudu luwih ngati-ati misale. Seko aku dewe iseh nerapke itungan apalan mangsa iku, Mas.” Wawancara dengan Jumadil di Kapanewon Pandak, 28 Oktober 2025, Pukul 20.30 WIB.

4 Kutipan wawancara asli, “Pranatamangsa kuwi ora mung dinggo urusan babagan pertanian. Itungane iso digunakake nganggo golek dino sik apik misale kanggo manten utawa mbangun omah, wong-wong isih ndelok petungan. Kuwi wis dadi tradisi saka mbiyen.” Wawancara dengan Mulyono di Kapanewon Sewon, 25 Oktober 2025, Pukul 19.30 WIB.